

PU Provinsi Ancam Blacklist Kontraktor Nakal

PONTIANAK. Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan audit terfokus terhadap aset dan infrastruktur Pemprov Kalbar semester II Tahun 2011 disikapi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi. Upaya pengawasan akan diperketat untuk mencegah adanya temuan.

"Kita akan evaluasi kinerja para kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur," tegas Ir Jakius Sinyor, Kepala Dinas PU Kalbar dijumpai Equator usai menghadiri rapat dengan dewan provinsi, Selasa pagi (22/2).

Langkah evaluasi itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan PU terhadap pekerjaan proyek infrastruktur yang ada di dinas tersebut. PU akan memonitor setiap pekerjaan kontraktor agar sesuai kontrak. Sehingga tidak menjadi temuan BPK di kemudian

hari. "Kalau nanti kesalahan ada pada kontraktor, kita akan blacklist (masuk daftar hitam, red)," tegas Jakius.

Selain mem-blacklist perusahaan nakal, pihaknya juga akan melaporkan perusahaan bersangkutan ke asosiasi atau lembaga yang menaunginya. Dengan laporan itu, Dinas PU berharap asosiasi bisa memberikan sanksi kepada perusahaan dimaksud, dan memberikan rekomendasi untuk tidak lagi mengikuti tender di kemudian hari.

"Kita kan tidak bisa melarang perusahaan mengikuti tender. Tapi kalau sudah ada larangan dari asosiasi yang menaunginya, baru kita bisa menggugurkan perusahaan tersebut," pungkas Jakius.

Jakius belum bisa memperkirakan berapa banyak kontraktor nakal. Tetapi, kata dia, akan ketahuan setelah proses monitoring.

Rencana blacklist ini mendapat respons Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalbar, Ir H Bambang Widiyanto. "Kita setuju jika BPK mengaudit terfokus namun kontraktor tidak bisa dipersalahkan begitu saja jika ada pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan," kata Bambang.

"Dalam pelaksanaan pekerjaan, banyak unsur yang terlibat. Jadi jangan hanya menggambinghitamkan kontraktor," tegas Bambang dihubungi Equator via selularnya, sore kemarin.

Dalam melakukan pekerjaan, kata Bambang, kontraktor akan berpegang pada kontrak kerja. Kontrak ini sangat menentukan mutu pekerjaan yang didalamnya juga ada perencanaan oleh kuasa pengguna anggaran atau instansi

■ Halaman 7

PU Provinsi

pemilik proyek.

"Dalam asas kemanfaatan, perencanaan ini bisanya muncul dari Musrebang. Jika dari awal perencanaannya sudah tidak

baik, tidak boleh kontraktor dipersalahkan," ujar Bambang.

Tak hanya itu, jelas Bambang, dalam melakukan pekerjaan kontraktor juga diawasi oleh

Konsultan Pengawas. Konsultan yang dibiayai oleh negara ini bekerja untuk memastikan agar pekerjaan tidak melenceng dari bestek atau kontrak.

"Jika ada pekerjaan yang salah, harusnya Konsultan Pengawas yang paling bersalah. Kenapa mereka tidak mengawasi pekerjaan," pungkas Bambang. (bdu)

..... dari halaman 1